

# **BAB I**

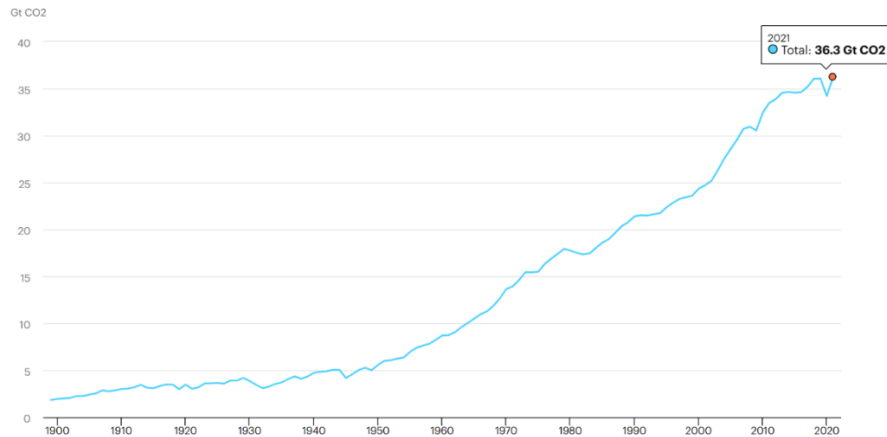
## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perubahan iklim global hingga kini telah menjadi isu yang mendesak dan mengakibatkan dampak yang serius, baik bagi lingkungan maupun keberlanjutan ekonomi global. Perubahan iklim yang terjadi memang memberikan dampak yang semakin mengkhawatirkan secara nyata terhadap kehidupan di bumi seperti kenaikan suhu udara yang menjadi lebih panas, bencana hidrometeorologi di berbagai belahan dunia, hingga terganggunya siklus hidrologi. World Meteorological Organization (WMO) telah meriliskan laporan terbarunya dalam *State of The Climate 2022* dengan menyebutkan bahwa tahun 2022 merupakan tahun yang menempati peringkat ke-6 tahun terpanas dunia dengan tahun 2015-2022 adalah 8 tahun terpanas dalam catatannya (World Meteorological Organization, 2023).

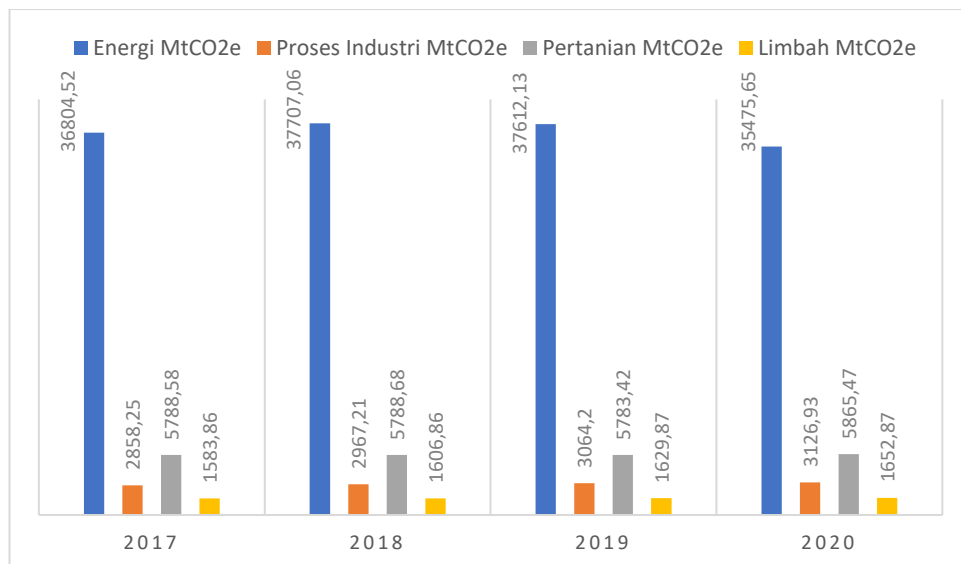
Emisi karbon merupakan salah satu emisi utama yang berkontribusi terhadap perubahan iklim tersebut bersama dengan emisi gas rumah kaca lainnya, seperti CH<sub>4</sub> (metana), N<sub>2</sub>O (dinitrogen dioksida), HFC (hidrofluorokarbon), PFC (perfluorocarbon), dan SF<sub>6</sub> (sulfur heksaflorida) (Nord & Bolland, 2020: 3). Mengutip data yang dikemukakan oleh European Commission bahwa volume emisi gas rumah kaca global mencapai 53,79 gigaton setara karbon dioksida (Gt CO<sub>2</sub>e) pada tahun 2022, sedangkan di Indonesia sendiri mencapai 1,24 Gt CO<sub>2</sub>e pada tahun yang sama dan sekaligus menandai terjadinya peningkatan sebesar 10%

dibandingkan dengan tahun sebelumnya di tahun 2021, serta menjadi rekor tertinggi yang baru (Ahdiat, 2023).



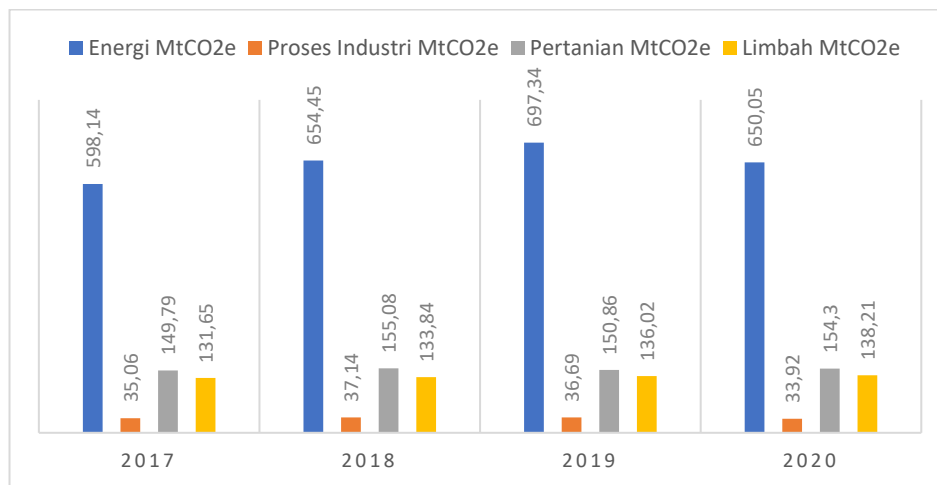
Sumber: International Energy Agency

**Gambar 1.1**  
**Peningkatan Emisi Karbon dari Pembakaran Energi secara Global**



Sumber: Climate Watch (diolah oleh penulis)

**Gambar 1.2**  
**Kontribusi Emisi Gas Rumah Kaca dari Setiap Sektor Secara Global 2017-2020**



Sumber: Climate Watch (diolah oleh penulis)

**Gambar 1.3**  
**Kontribusi Emisi Gas Rumah Kaca dari Setiap Sektor**  
**di Indonesia 2017-2020**

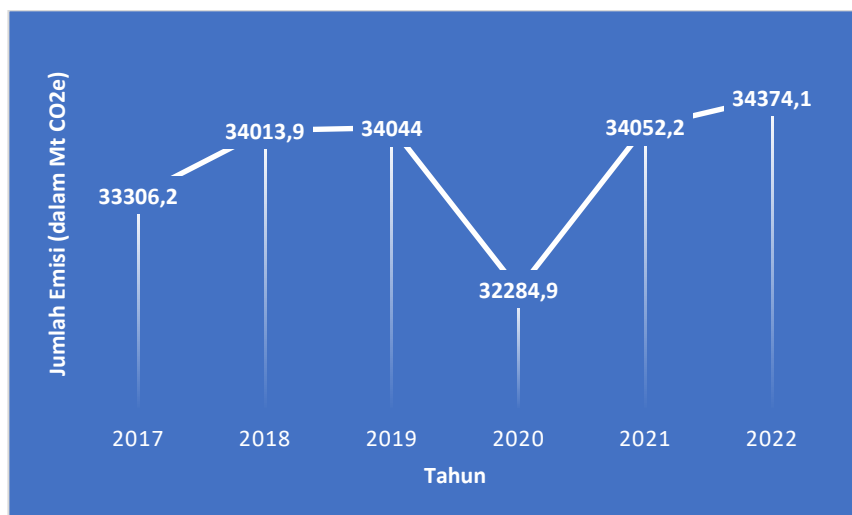
Dalam kinerja yang dilakukan oleh setiap perusahaan yang ada, sektor energi diketahui menjadi roda penggerak dan sektor utama penyumbang emisi gas rumah kaca. Apabila mengutip data dari International Energy Agency atau IEA (2021), disebutkan bahwa hingga tahun 2021 terjadi peningkatan emisi karbon dari pembakaran energi secara global sebesar 36,3 Gt CO<sub>2</sub>e (Gambar 1.1). Adapun data yang dilaporkan oleh Climate Watch menyebutkan bahwa sektor energi memberikan sumbangsih sebesar 35,48 Gt CO<sub>2</sub>e (Gambar 1.2) atau 76,92% dari total emisi secara global di tahun 2020, bahkan apabila ditinjau dari tahun 2017 hingga 2020 pun sektor energi masih mendominasi (Climate Watch, 2023). Di Indonesia, sektor energi masih menempati posisi tertinggi dalam kontribusinya terhadap emisi gas rumah kaca dari tahun 2017 hingga 2020 berdasarkan sumber laporan yang sama (Gambar 1.3) (Climate Watch, 2023). Angka tersebut diproyeksikan naik pada tahun-tahun berikutnya. Hal tersebut didukung oleh data yang dikemukakan oleh Energy Institute (2023) dengan menampilkan grafik

kenaikan emisi karbon dioksida di tahun 2022, baik secara global, maupun di Indonesia itu sendiri (Gambar 1.4 dan 1.5).



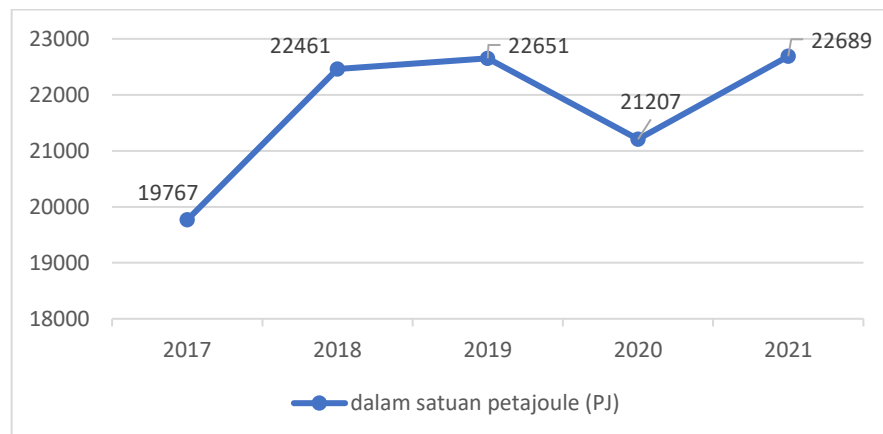
Sumber: Energy Institute (diolah oleh penulis)

**Gambar 1. 4**  
**Peningkatan Emisi Karbon dari Energi di Indonesia Tahun 2017-2022**



Sumber: Energy Institute (diolah oleh penulis)

**Gambar 1. 5**  
**Peningkatan Emisi Karbon dari Energi secara Global Tahun 2017-2022**



Sumber: Neraca Arus Energi, BPS (diolah oleh penulis)

**Gambar 1.6**  
**Input Energi Bruto di Indonesia Tahun 2017-2021**

Apabila ditinjau dari input energi bruto sebagai indikator yang menggambarkan besarnya tekanan yang diberikan kepada lingkungan dalam penyediaan energi untuk perekonomian Indonesia, di periode 2017-2021 cenderung mengalami peningkatan yang disebabkan oleh meningkatnya energi dari input alam yang berasal dari batubara (Gambar 1.6). Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan kenyataan bahwa di Indonesia sendiri telah ada beberapa regulasi yang menunjukkan komitmen untuk menurunkan emisi sebagai upaya untuk meminimalisir tekanan yang diberikan kepada lingkungan.

Pada tahun 2008, di Indonesia, Dewan Nasional Perubahan Iklim dibentuk sebagai wadah untuk mengkomunikasikan isu-isu perubahan iklim kepada para pemangku kepentingan yang dilengkapi dengan Peraturan Presiden Nomor 61/2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Gas Rumah Kaca dan 71/ 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional (Faisal dkk., 2018). Menurut Peraturan Presiden Nomor 61/2011, rencana aksi nasional terdiri dari tiga aksi untuk pengurangan emisi target pengurangan emisi dan target sektor industri:

strategi, program, dan kegiatan yang berkontribusi terhadap pengurangan emisi (Pemerintah Indonesia, 2011a). Sementara itu, pelaksanaan inventarisasi GRK (Gas Rumah Kaca) bertujuan untuk menyediakan informasi secara berkala mengenai tingkat, status, dan kecenderungan perubahan emisi dan penyerapan GRK, termasuk cadangan karbon di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten (Pemerintah Indonesia, 2011b). Namun, peraturan tersebut hanya menetapkan kebijakan mengenai komitmen untuk mengurangi emisi GRK, bukan mengatur terkait pelaporan/pengungkapan. Meskipun telah ada aturan yang dibentuk berdasarkan kesepakatan yang telah diratifikasi, pelaporan hingga pengungkapan mengenai emisi GRK masih belum lengkap dan dipertanyakan komprehensivitasnya, bahkan untuk ukuran negara maju sekalipun (Kolk dkk., 2008). Di Indonesia sendiri, pelaporan mengenai emisi GRK masih bersifat sukarela (*voluntary*) (Sandy & Ardiana, 2023; Wardhani & Kawedar, 2019).

Dalam beberapa tahun ke belakang, untuk mencegah kerugian ekonomi yang lebih besar karena kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan ekonomi, Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim membuat amandemen internasional yang dikenal sebagai Protokol Kyoto pada tahun 1997. Protokol Kyoto adalah perjanjian internasional yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (Brohé, 2017: 17). Indonesia telah menuangkan Protokol Kyoto ke dalam peraturan perundang-undangan seperti UU No. 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja PBB Tentang Perubahan Iklim); Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2011 tentang

Rencana Aksi Nasional penurunan Emisi Gas Rumah Kaca; dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional. Selain itu, Komitmen Indonesia dalam upaya menjaga kenaikan suhu global, apabila mengacu pada Persetujuan Paris (*Paris Agreement*), telah dituangkan dalam kontribusi yang ditetapkan secara nasional (*Nationally Determined Contribution/NDC*), melalui Undang-Undang Nomor 16/2016, yaitu pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada tahun 2030 sebesar 31,89% dengan upaya sendiri dan sebesar 43,20% dengan bantuan internasional (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, 2023).

Implikasi dari hadirnya Protokol Kyoto yang sebelumnya dijelaskan memunculkan adanya praktik penghitungan karbon/akuntansi karbon (*carbon accounting*) (Irwhantoko & Basuki, 2016). Praktik tersebut hadir karena dalam Protokol Kyoto mengatur mengenai kebijakan yang berfokus pada penjagaan terhadap konsentrasi GRK agar tidak berada pada tingkat yang membahayakan melalui mekanisme *joint implementation*, *emission trading (carbon trading)* dan *clean development mechanism* (Rahmanita, 2020). Menurut (Brohé, 2017: 4), akuntansi karbon (*carbon accounting*) dapat diartikan sebagai suatu metodologi yang dikembangkan untuk melakukan perkiraan terhadap kerusakan, biaya, dan manfaat dari mitigasi atau adaptasi dari suatu strategi yang memberikan pemahaman terhadap biaya eksternal dari emisi karbon. Akuntansi karbon memberikan fungsi pendukung yang di antaranya yakni peningkatan transparansi dalam lingkungan pemangku kepentingan eksternal bisnis dan mengidentifikasi

potensi pengurangan, mengevaluasi langkah-langkah dalam rangka mengurangi emisi karbon di perusahaan tersebut (Schaltegger dkk., 2015: 8).

Walaupun pelaporan dan pengungkapan emisi GRK masih belum menemukan penjelasan yang begitu komprehensif, terdapat beberapa pelaporan *carbon accounting* yang dilakukan oleh perusahaan ditemukan terintegrasi dalam pelaporan *corporate social responsibility* (CSR) (D. N. Pratiwi, 2018). CSR tersendiri diartikan sebagai suatu komitmen yang ditunjukkan oleh perusahaan atau industri untuk mempertanggungjawabkan dampak operasinya dalam dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan agar dapat memberikan atau menyumbang manfaat kepada masyarakat dan lingkungan (Visser, 2010: 106). Maka dari itu, emisi karbon pun perlu dan sangat penting untuk diungkapkan dalam rangka menunjukkan praktik-praktik yang memperkuat komitmen yang telah disepakati sebelumnya serta meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan dan kehidupan di bumi. Hal tersebut pun sejalan dengan Undang-Undang Penanaman Modal No.25 Tahun 2007 (Pemerintah Indonesia, 2007) yang menyatakan bahwa:

“Tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap Perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat”

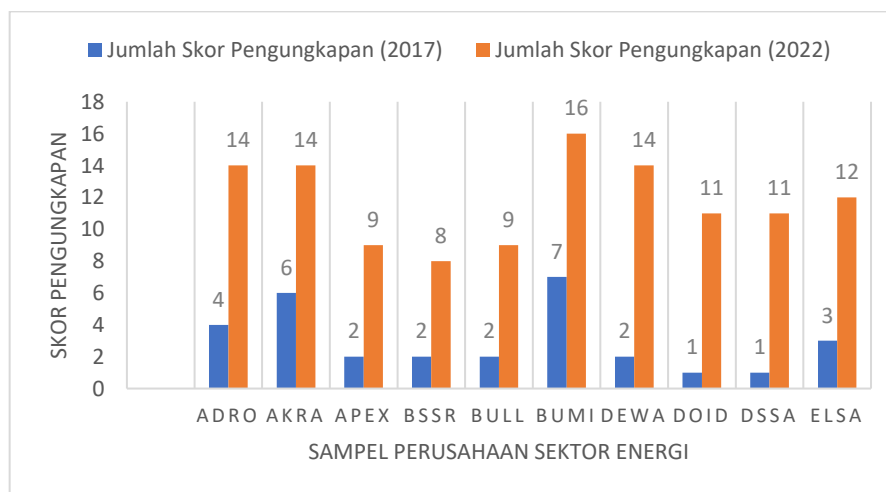
Melalui *carbon emission disclosure*/CED (pengungkapan emisi karbon), *stakeholder* atau publik dapat menilai peran perusahaan dalam mengurangi gas rumah kaca (GRK) sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan, sehingga usaha perusahaan untuk mengurangi emisi karbon dengan *carbon*



*accounting* sejalan dengan konsep CSR. Terlebih lagi, dewasa ini, agenda terkait dengan *sustainability* (keberlanjutan) telah menjadi agenda yang sangat disoroti dalam taraf global maupun di Indonesia, bahkan secara detail termaktub dalam RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) 2025-2045 dalam sasaran visi 5, yakni “Intensitas emisi GRK menurun menuju *net emission zero*” (Kementerian PPN/Bappenas, 2024). Adapun ESG (*Environment, Social, Governance*) adalah istilah yang digunakan untuk mengidentifikasi hal-hal yang dikaitkan dengan keberlanjutan atau tanggung jawab perusahaan yang berfokus pada dampak terhadap lingkungan dan masyarakat luas. Dalam konteks menyadari akan risiko perubahan iklim dalam beberapa tahun mendatang, industri perlu mempercepat transisi pengelolaan yang mengaplikasikan kerangka ESG untuk menghadapi isu keberlanjutan iklim bisnis karena faktor keberlanjutan (*sustainability*) mulai menonjol pada strategi pembangunan di banyak negara. Upaya penerapan ESG oleh industri dimaksudkan untuk melihat bagaimana kesehatan keuangan perusahaan dalam menghadapi risiko terkait iklim (KataData Insight Centre, 2022: 59).

Banyak faktor yang memengaruhi *carbon emission disclosure* yang dilakukan oleh suatu perusahaan, salah satunya dapat ditinjau dalam perspektif internal perusahaan (kesehatan keuangan) itu sendiri, seperti ukuran perusahaan (*firm size*), kinerja keuangan, dan sebagainya (Daryanto dkk., 2020; Desai, 2022; Faisal dkk., 2018; Kılıç & Kuzey, 2019). Perspektif tersebut masih relevan untuk dibahas dalam penelitian ini menimbang kenyataan praktik pengungkapan emisi karbon yang masih bersifat sukarela dan regulasi yang dihadirkan belum mampu memberikan

praktik yang begitu jelas terhadap pengungkapan karbon, sehingga hal itu dikembalikan lagi ke perusahaan tersebut. Hal itu didukung dengan pernyataan Luo dkk. (2013) yang mengungkapkan bahwa sifat pelaporan karbon yang bersifat sukarela dapat terpengaruh oleh faktor internal meliputi sumber daya keuangan itu sendiri karena pengungkapan karbon itu merupakan bagian dari strategi iklim yang secara keseluruhan membutuhkan sumber daya keuangan yang cukup besar. Sumber daya keuangan diproksikan dengan profitabilitas, *leverage*, dan peluang pertumbuhan/pertumbuhan perusahaan (ukuran perusahaan) (Luo dkk., 2013). Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan cenderung tidak mengungkapkan informasi sensitif karena kemungkinan besar mereka akan terlibat dalam tuntutan hukum (Lee dkk., 2023).

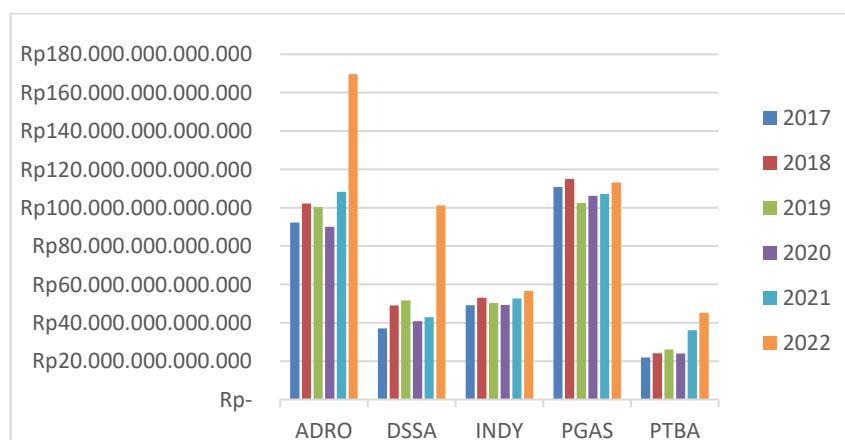


Sumber: Sustainability Report Tahun 2017 dan 2022 (diolah oleh penulis)

**Gambar 1. 7**  
**Skor Pengungkapan Emisi Karbon**

Di tengah kenyataan bahwa praktik pengungkapan emisi karbon masih bersifat sukarela dan maraknya isu mengenai *climate change*, skor pengungkapan emisi karbon atau *carbon emission disclosure* pada perusahaan sektor energi di Indonesia

menunjukkan perbedaan nilai (beragam) pada di tahun 2017 hingga 2022 apabila mengacu pada kerangka model *carbon emission disclosure checklist* yang dikembangkan oleh Choi dkk., (2013: 67) dan Carbon Disclosure Project atau CDP. Carbon Disclosure Project (2023), yang merupakan instansi independen yang menyoroiti isu *climate change*, mengemukakan bahwa terdapat lima kategori besar dalam menentukan tingkat pengungkapan emisi karbon, yaitu: perubahan iklim/*climate change* (CC), gas rumah kaca/*green house gasses* (GHG), konsumsi energi/*energy consumption* (EC), pengurangan dan biaya/*reduction and cost* (RC), dan akuntabilitas biaya dan emisi karbon/*accountability of cost and carbon emission* (ACC). Setiap kategori mencakup beberapa item. Dalam model tersebut terdapat total 18 item. Dengan adanya kenyataan bahwa praktik pengungkapan di Indonesia masih bersifat sukarela (*voluntary*) (Sandy & Ardiana, 2023; Wardhani & Kawedar, 2019), maka praktik pengungkapan emisi karbon terindikasi dikembalikan kembali kepada perusahaan yang bersangkutan, tergantung keadaan internal perusahaan, begitu pun termasuk faktor keuangan perusahaan tersebut (Luo dkk., 2013).

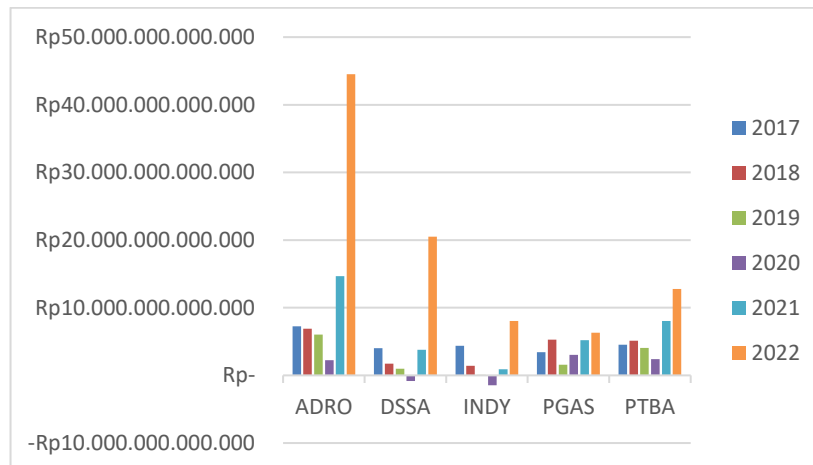


Sumber: Laporan Keuangan Perusahaan Terkait (diolah oleh penulis)

**Gambar 1. 8**  
**Total Aset dari Beberapa Sampel Perusahaan Sektor Energi**  
**Tahun 2017-2022**

Total aset yang dimiliki oleh setiap sampel perusahaan itu pun beragam (Gambar 1.8). Berdasarkan sampel yang ditinjau dari perusahaan sektor energi, bahwa PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO) memiliki total aset sebesar Rp 92.316.072.000.000 di tahun 2017 dan cenderung meningkat hingga menjadi Rp 169.611.642.000.000 di tahun 2022. PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) memiliki total aset sejumlah Rp 37.083.585.600.000 di tahun 2017 dan meningkat menjadi Rp 101.168.891.290.058 di tahun 2022. PT Indika Energy Tbk. (INDY) memiliki total aset sebesar Rp 49.256.536.799.844 di tahun 2017 dan meningkat menjadi Rp 56.535.201.092.702 di tahun 2022. PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) memiliki total aset sebesar Rp 110.865.725.918.616 di tahun 2017 dan meningkat menjadi Rp 113.182.342.376.842 di tahun 2022. Begitu pun dengan PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) memiliki total aset sebesar Rp 21.987.482.000.000 di tahun 2017 dan meningkat menjadi Rp 45.359.207.000.000 di tahun 2022. Penelitian-penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa kehadiran total aset, yang menjadi indikator dalam meninjau ukuran perusahaan (*firm size*), memberikan pengaruh signifikan terhadap praktik *carbon emission disclosure* (Desai, 2022; Faisal dkk., 2018; Kılıç & Kuzey, 2019). Kesalahan atas peningkatan tajam emisi karbon umumnya jatuh pada perusahaan-perusahaan besar, yang kini berada di bawah tekanan yang semakin besar untuk melaporkan dan mengurangi emisi mereka secara terbuka (Lee dkk., 2023). Akan tetapi, terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang mengemukakan bahwa *firm size* berpengaruh tidak signifikan

terhadap *carbon emission disclosure* (Daryanto dkk., 2020; Pranasyahputra dkk., 2020).

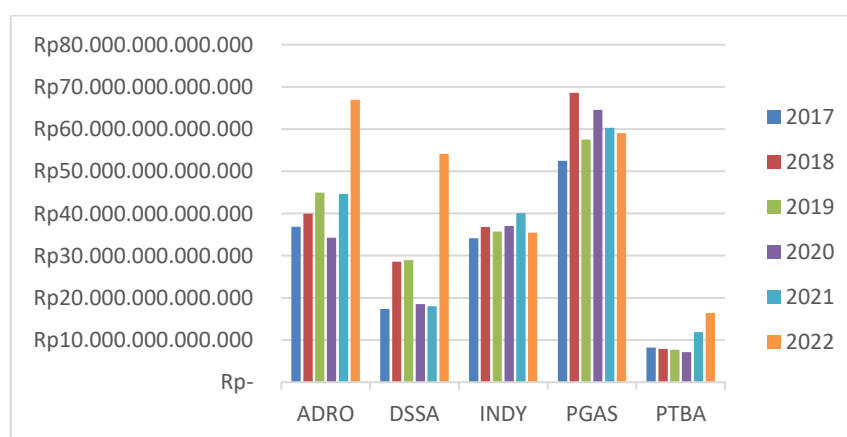


Sumber: Laporan Keuangan Perusahaan Terkait (diolah oleh penulis)

### **Gambar 1. 9** **Laba Tahun Berjalan dari Beberapa Sampel Perusahaan Sektor Energi** **Tahun 2017-2022**

Selain itu, kehadiran profitabilitas turut serta memengaruhi *carbon emission disclosure* secara signifikan (Abdullah dkk., 2020; Desai, 2022; Faisal dkk., 2018). Kimmel dkk., (2016: 662) mengemukakan bahwa profitabilitas seringkali digunakan sebagai uji utama efektivitas operasi manajemen dalam menghasilkan pendapatan atau laba. Laba tahun berjalan, yang merepresentasikan tingkat profitabilitas perusahaan, adalah sumber daya keuangan yang dapat menunjukkan kinerja perusahaan dalam mengambil beberapa langkah untuk mengurangi emisi dan mengungkapkan langkah-langkah tersebut dalam laporan tahunannya (Ulupui dkk., 2020). Berdasarkan sampel yang ditinjau dari perusahaan sektor energi, bahwa PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO) memiliki laba tahun berjalan sebesar Rp 7.267.662.024.000 di tahun 2017 dan menjadi Rp 44.536.395.913.000 di tahun 2022. PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) memiliki laba tahun

berjalan sejumlah Rp 4.011.399.600.792 di tahun 2017 dan menjadi Rp 20.505.847.639.714 di tahun 2022. PT Indika Energy Tbk. (INDY) memiliki laba tahun berjalan sebesar Rp 4.357.486.011.036 di tahun 2017 dan meningkat menjadi Rp 8.035.018.781.907 di tahun 2022. PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) memiliki laba tahun berjalan sebesar Rp 3.431.555.903.712 di tahun 2017 dan meningkat menjadi Rp 6.313.519.512.471 di tahun 2022. Begitu pun dengan PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) memiliki total aset sebesar Rp 4.547.232.000.000 di tahun 2017 dan meningkat menjadi Rp 12.779.427.000.000 di tahun 2022. Akan tetapi dalam penelitian yang lain menyebutkan bahwa profitabilitas berpengaruh tidak signifikan terhadap *carbon emission disclosure* (Daryanto dkk., 2020; Kılıç & Kuzey, 2019; D. N. Pratiwi, 2018).



Sumber: Laporan Keuangan Perusahaan Terkait (diolah oleh penulis)

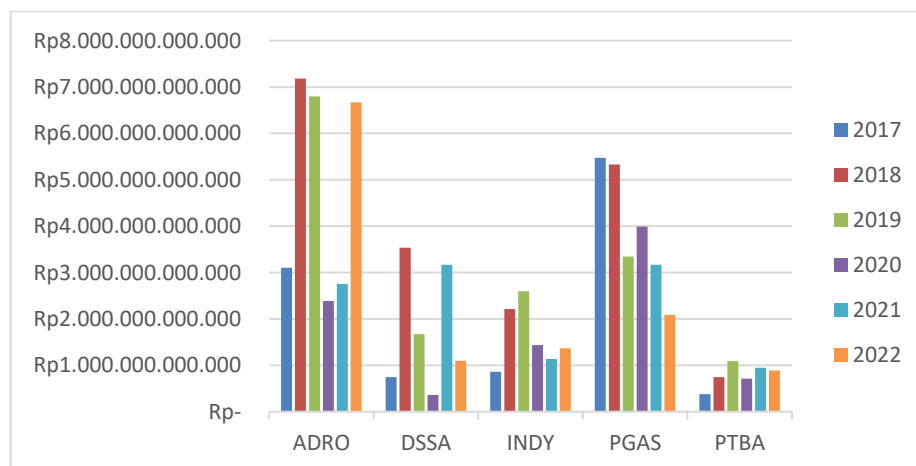
**Gambar 1. 10**  
**Total Liabilitas dari Beberapa Sampel Perusahaan Sektor Energi**  
**Tahun 2017-2022**

Apabila ditinjau dari total liabilitasnya (Gambar 1.10), PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO) memiliki total liabilitas sebesar Rp 36.884.700.960.000 di tahun 2017 dan menjadi Rp 66.934.917.339.000 di tahun 2022. PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) memiliki total liabilitas sejumlah Rp 17.377.638.792.816 di

tahun 2017 dan menjadi Rp 54.101.991.174.830 di tahun 2022. PT Indika Energy Tbk. (INDY) memiliki total liabilitas sebesar Rp 34.150.214.408.484 di tahun 2017 dan menjadi Rp 35.452.924.480.749 di tahun 2022. PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) memiliki total liabilitas sebesar Rp 52.468.242.181.308 di tahun 2017 dan menjadi Rp 59.039.848.470.464 di tahun 2022. Begitu pun dengan PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) memiliki total liabilitas sebesar Rp 8.187.497.000.000 di tahun 2017 dan meningkat menjadi Rp 16.443.161.000.000 di tahun 2022. Total liabilitas akan turut serta memengaruhi *leverage*. *Leverage* merupakan suatu bentuk analisis atau pengukuran untuk meninjau tingkat pembiayaan aset dalam suatu bisnis yang didasarkan atas pinjaman yang dilakukan (Kimmel dkk., 2016: 673). Dalam beberapa penelitian sebelumnya disebutkan bahwa *leverage* memengaruhi *carbon emission disclosure* secara signifikan (Desai, 2022; Faisal dkk., 2018; Rahmadhani & Indriyani, 2019). Akan tetapi, terdapat pula penelitian-penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa berpengaruh tidak signifikan (Kılıç & Kuzey, 2019; Ulupui dkk., 2020).

Adapun mengenai *capital expenditure* atau belanja/pengeluaran modal pun turut serta memengaruhi *carbon emission disclosure* (Ratmono dkk., 2020; Rooschella & Sulfitri, 2023; Sulfitri dkk., 2023). *Capital expenditure* diartikan sebagai biaya/pengeluaran untuk pembelian atau perluasan aset jangka panjang (Needles dkk., 2011: 477). PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO) memiliki *capital expenditure* sebesar Rp 3.102.492.000.000 di tahun 2017 dan menjadi Rp 6.669.944.000.000 di tahun 2022. PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) memiliki *capital expenditure* sejumlah Rp 746.494.800.000 di tahun 2017 dan

menjadi Rp 1.096.450.700.000 di tahun 2022. PT Indika Energy Tbk. (INDY) memiliki *capital expenditure* sebesar Rp 860.850.460.344 di tahun 2017 dan menjadi Rp 1.367.830.381.177 di tahun 2022. PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) memiliki *capital expenditure* sebesar Rp 5.474.426.484.636 di tahun 2017 dan menjadi Rp 2.087.503.888.772 di tahun 2022. Begitu pun dengan PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) memiliki *capital expenditure* sebesar Rp 376.861.000.000 di tahun 2017 dan meningkat menjadi Rp 889.136.000.000 di tahun 2022. Dalam beberapa penelitian sebelumnya disebutkan bahwa *capital expenditure* berpengaruh signifikan terhadap praktik pengungkapan emisi karbon karena berkaitan dengan bagaimana pihak perusahaan akan mengambil keputusan terkait pengelolaan aset jangka panjangnya (Ratmono dkk., 2020; Rooschella & Sulfitri, 2023; Sulfitri dkk., 2023). Namun dalam penelitian lainnya disebutkan bahwa itu berpengaruh tidak signifikan (Baskoro Athala Gusti & Darmawati, 2023; Chithambo & Tauringana, 2014).



Sumber: Laporan Keuangan Perusahaan Terkait (diolah oleh penulis)

**Gambar 1. 11**  
***Capital Expenditure* Beberapa Sampel Perusahaan Sektor Energi**  
**Tahun 2017-2022**



Dari uraian penjelasan-penjelasan sebelumnya didapati bahwa isu mengenai *climate change* kian mendesak, bahkan penyumbang terbesar keberadaan masalah *climate change* tersebut adalah aktivitas industri dari sektor energi yang banyak menghasilkan emisi karbon, komponen utama dalam gas rumah kaca yang menyebabkan *climate change*. Akan tetapi, praktik *carbon emission disclosure* atau pengungkapan emisi karbon masih belum sejalan dan optimal dengan komitmen pemerintah di negeri ini yang menghendaki adanya penurunan emisi. Hal tersebut ditandai dengan adanya peningkatan produktivitas dari operasional perusahaan di sektor energi dan praktik pengungkapan yang masih bersifat sukarela (*voluntary*). Kenyataan tersebut memberikan indikasi bahwa praktik pengungkapan emisi karbon dikembalikan kepada perusahaan terkait dan banyak dipengaruhi oleh aktivitas yang berkenaan dengan internal perusahaannya dalam mengambil keputusan. Kenyataan tersebut pun telah diperkuat oleh fenomena-fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya. Selain dibahas dalam sudut pandang fenomena, penelitian-penelitian sebelumnya masih menunjukkan hasil yang bervariasi yang ditandai dengan hasil yang berpengaruh dan tidak berpengaruh. Adapun penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi praktik pengungkapan emisi karbon (*carbon emission disclosure*) pada objek penelitian di sektor energi masih sangat jarang. Maka dari itu, atas kehadiran *research gap* di atas, penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Firm Size*, Profitabilitas, Leverage, dan *Capital Expenditure* terhadap *Carbon Emission Disclosure* (Survei pada Perusahaan Sektor Energi di Bursa Efek Indonesia 2017-2022)”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, terdapat identifikasi masalah dalam ruang lingkup penelitian ini yang dimuat pada pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut.

1. Bagaimana *firm size*, profitabilitas, *leverage*, *capital expenditure*, dan *carbon emission disclosure* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2017-2022?
2. Bagaimana pengaruh *firm size*, profitabilitas, *leverage*, dan *capital expenditure* secara parsial terhadap *carbon emission disclosure* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2017-2022?
3. Bagaimana pengaruh *firm size*, profitabilitas, *leverage*, dan *capital expenditure* secara simultan terhadap *carbon emission disclosure* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2017-2022?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, terdapat tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis, yakni sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui *firm size*, profitabilitas, *leverage*, *capital expenditure*, dan *carbon emission disclosure* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2017-2022;
2. Untuk mengetahui pengaruh *firm size*, profitabilitas, *leverage*, dan *capital expenditure* secara parsial terhadap *carbon emission disclosure* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2017-2022; dan

3. Untuk mengetahui pengaruh *firm size*, profitabilitas, *leverage*, dan *capital expenditure* secara simultan terhadap *carbon emission disclosure* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2017-2022.

## **1.4 Kegunaan Hasil Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu**

#### **1. Kontribusi terhadap Pengetahuan Akademis**

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengetahuan akademis dalam bidang lingkungan dan keuangan. Dengan menganalisis pengaruh *firm size* (ukuran perusahaan), profitabilitas, *leverage*, dan *capital expenditure* terhadap *carbon emission disclosure* (pengungkapan emisi karbon), penelitian ini dapat memperkaya literatur yang ada dalam konteks *sustainability disclosure* dan praktik keuangan perusahaan, terutama di sektor energi di Indonesia;

#### **2. Pengembangan Teori**

Temuan dari penelitian ini dapat membantu dalam mengembangkan teori-teori yang berkaitan dengan hubungan antara faktor-faktor finansial dan tingkat pengungkapan emisi karbon di sektor energi. Hal ini dapat membuka jalan bagi penelitian lebih lanjut dalam memahami dinamika kompleks antara aspek keuangan dan lingkungan.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

1. Pemahaman terhadap Pengaruh Faktor Keuangan terhadap Pengungkapan Emisi Karbon

Hasil penelitian dapat memberikan wawasan praktis kepada perusahaan di sektor energi mengenai bagaimana ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan *capital expenditure* dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan emisi karbon. Hal ini dapat membantu manajer keuangan dalam membuat keputusan strategis terkait dengan pelaporan keberlanjutan.

## 2. Pengembangan Kebijakan Keberlanjutan

Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi perusahaan dan regulator untuk mengembangkan kebijakan keberlanjutan yang lebih efektif dan relevan dengan konteks sektor energi. Perusahaan dapat menggunakan temuan penelitian untuk merancang strategi pengurangan emisi dan meningkatkan transparansi dalam pelaporan keberlanjutan mereka.

## 3. Dukungan dalam Pengambilan Keputusan Keuangan dan Investasi

Bagi investor dan analis keuangan, penelitian ini dapat memberikan informasi berharga tentang bagaimana faktor-faktor keuangan dapat memengaruhi risiko dan peluang investasi di perusahaan sektor energi. Para investor dapat menggunakan temuan penelitian untuk melakukan penilaian risiko yang lebih baik terkait dengan aspek keberlanjutan dan dampak lingkungan. Ini dapat membantu mereka dalam membuat keputusan investasi yang lebih mempertimbangkan aspek berkelanjutan.

## 1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

### 1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan pada perusahaan yang bergerak dalam sektor energi dan terdaftar dalam BEI (Bursa Efek Indonesia) dalam rentang tahun

2017-2022. Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui situs resmi setiap perusahaan dan situs resmi Bursa Efek Indonesia ([www.idx.com](http://www.idx.com)) berupa *Annual Report* dan/atau *Sustainability Report* hingga Laporan Keuangan.

### **1.5.2 Waktu Penelitian**

Waktu penelitian ini telah dilaksanakan dalam kurun waktu 9 bulan, terhitung mulai dari November 2023 s.d. Juli 2024.